

## **BAB II**

### **DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Laporan Keuangan**

##### **2.1.1. Definisi Laporan Keuangan**

Menurut Harnanto (2002), laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, yang terdiri dari dua laporan utama, yaitu neraca dan laporan perhitungan laba rugi, dan berupa laporan yang sifatnya sebagai pelengkap seperti laporan laba yang ditahan serta laporan sumber dan penggunaan dana atau laporan perubahan posisi keuangan. Sedangkan menurut Harahap (2009), laporan keuangan merupakan penggambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Adapun menurut Munawir (2010), laporan keuangan merupakan suatu bentuk pelaporan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Kemudian menurut Gumanti (2011), laporan keuangan merupakan ringkasan dari harta, kewajiban, dan kinerja operasi selama suatu periode akuntansi tertentu.

Berdasarkan definisi dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan penggambaran kondisi keuangan suatu perusahaan atau instansi pemerintahan yang dicatat pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

### 2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan sosial, ekonomi ataupun politik. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), tujuan laporan keuangan ialah sebagai berikut;

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Sedangkan menurut Mahmudi (2011), tujuan laporan keuangan ialah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas,

dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya manusia.

### **2.1.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Sedangkan menurut Mahsun, dkk (2013) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan akhir dari proses akuntansi keuangan daerah berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk digunakan oleh pihak-pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah dalam menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu juga sebagai salah satu bentuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **2.1.4. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Mahsun, dkk (2013), terdapat sejumlah enam komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran berisi informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta risiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi mengenai indikasi apakah sumber-sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Neraca

Neraca memberikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas dana entitas pada tanggal tertentu.

## 3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas terkait dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas entitas selama periode tertentu.

## 4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

## 5. Laporan Kinerja Keuangan

Laporan kinerja keuangan merupakan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual.

#### 6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menunjukkan perbandingan dan peningkatan atau penurunan ekuitas dari tahun ke tahun.

## 2.2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### 2.2.1. Definisi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 mengenai Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang kondisi keuangan pemerintah. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/ Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas.”

Menurut Yadiati, dkk (2017), menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan merupakan kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan ukuran seberapa baik tingkat suatu laporan keuangan dapat menyajikan informasi keuangan secara wajar dan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah.

### **2.2.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat informatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

#### **1. Relevan**

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Informasi yang relevan meliputi hal-hal berikut:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
- b. Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

1) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

2) Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

3) Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2. Andal

Informasi laporan keuangan dikatakan andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang seharusnya wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpul yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

## 3. Dapat dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya.

#### 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami apabila disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan mempunyai pengetahuan mengenai kegiatan operasi entitas pelaporan.

Pada variabel ini, peneliti menggunakan kuesioner dari penelitian terdahulu dengan menggunakan kuesioner Pujanira (2017).

### **2.3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah**

#### **2.3.1. Definisi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah**

Dalam Mardiasmo (2002), standar akuntansi ialah sebagai pedoman dalam mengatur atau menentukan perilaku akuntansi dalam proses penyusunan laporan keuangan yang ditujukan untuk pengguna laporan keuangan tersebut. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, dengan jelas disebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapannya dalam lingkup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 juga dijelaskan bahwa tujuan dari pembuatan laporan keuangan ialah untuk menyajikan informasi serta untuk membuat keputusan dan evaluasi kinerja.



### 2.3.2. Indikator Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) sebagai pedoman untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yaitu;

#### 1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan ini mengatur penyajian laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan, baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

#### 2. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran

Pernyataan ini menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran pemerintah untuk memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan.

#### 3. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas

Pernyataan ini mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan historis mengenai perubahan kas dan setara kas laporan keuangan dengan klasifikasi aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

#### 4. PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan

CaLK diperlukan untuk memudahkan pengguna memahami laporan keuangan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengartian laporan keuangan.

#### 5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan

Tujuan pernyataan ini ialah mengatur perlakuan akuntansi persediaan dan informasi lainnya yang disajikan di dalam laporan keuangan.

6. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi

Tujuan pernyataan ini ialah mengatur perlakuan akuntansi investasi dan pengungkapan informasi lainnya yang disajikan di dalam laporan keuangan.

7. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap

Tujuan pernyataan ini ialah mengatur perlakuan akuntansi aset tetap yang meliputi pengakuan dan penentuan nilai tercatat yang disajikan di dalam laporan keuangan.

8. PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Tujuan pernyataan ini ialah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan.

9. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban

Pernyataan ini mengatur perlakuan akuntansi kewajiban yang meliputi pada saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

10. PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Pernyataan ini mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

11. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasi

Pernyataan ini mengatur mengenai penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit pemerintahan untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

## 12. PSAP No. 12 Laporan Operasional

Pernyataan ini bertujuan menetapkan dasar-dasar penyajian laporan operasional pemerintah untuk memenuhi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pada variabel ini, peneliti menggunakan kuesioner dari penelitian terdahulu dengan menggunakan kuesioner Darmawan (2018).

## **2.4. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

### **2.4.1. Definisi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Hariadi, dkk (2010), menyatakan bahwa sistem akuntansi merupakan prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. Sedangkan menurut Mulyadi (2001), menyatakan bahwa:

“Organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang memudahkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dengan demikian sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur yang dilaksanakan mulai dari input berupa transaksi keuangan, proses berupa analisis transaksi yang dituangkan dalam catatan-catatan atau jurnal, dan output berupa laporan keuangan.”

Menurut Mahsun, dkk (2013), menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan proses untuk memahami metode dan tata cara penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah yang ditetapkan disuatu

pemerintahan daerah. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan penyelenggaraan prosedur dan tata cara yang harus dilaksanakan pemerintah daerah untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan agar dapat memudahkan pengelolaan keuangan daerah.

#### **2.4.2. Prosedur Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sekurang-kurangnya mencakup empat prosedur berikut, yaitu;

##### **1. Prosedur akuntansi penerimaan kas**

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas. Fungsi yang terkait merupakan fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan ialah Bukti Transfer, STS, Nota Kredit Bank, dan Buku Besar Kas.

##### **2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas**

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Fungsi yang terkait merupakan fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-

SKPD). Dokumen yang digunakan ialah SP2D, Nota Debit Bank, dan bukti pengeluaran kas lainnya.

### 3. Prosedur akuntansi aset tetap

Prosedur akuntansi aset tetap meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan aset tetap yang digunakan. Fungsi yang terkait merupakan fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Bukti transaksi yang digunakan merupakan berita acara penerimaan barang, surat keputusan peghapusan barang, surat keputusan mutasi barang, berita acara pemusnahan barang, berita acara penyerahan barang, berita acara penjualan, berita acara penyelesaian. Fungsi akuntansi membuat buku memorial memuat nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset, nilai, dan transaksi yang kemudian dicatat ke dalam jurnal.

### 4. Prosedur akuntansi selain kas

Prosedur akuntansi selain kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan transaksi kejadian selain kas. Akuntansi selain kas dapat berupa akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi kewajiban, dan akuntansi ekuitas. Fungsi yang terkait merupakan fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan ialah bukti memorial, jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan pelaksanaan dari pasal 232 ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006 mulai dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan yang dijadikan sebagai pedoman penyajian informasi laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pada variabel ini, peneliti menggunakan kuesioner dari penelitian terdahulu dengan menggunakan kuesioner Pujanira (2017).

## **2.5. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

### **2.5.1. Definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Mangkunegara (2012) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang atau individu dalam melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

### **2.5.2. Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif dan ekonomis. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia tersebut maka pembuatan laporan keuangan akan lebih efektif dan efisien. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang

harus dikerjakan (Mardiasmo, 2005). Menurut Hutapea dan Thoha (2008), menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator dalam mengukur kompetensi sumber daya manusia, yaitu:

1. Pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan, meliputi;
  - a. Mengetahui dan memahami pengetahuan dibidangnya masing-masing yang menyangkut tugas dan tanggungjawabnya dalam bekerja.
  - b. Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur, dan teknik yang baru dalam perusahaan.
  - c. Mengetahui bagaimana menggunakan informasi, peralatan, dan teknik yang tepat dan benar.
2. Keterampilan individu meliputi;
  - a. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan
  - b. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara lisan.
3. Sikap kerja;
  - a. Memiliki kemampuan dalam beraktivitas dalam bekerja
  - b. Adanya semangat kerja yang tinggi
  - c. Memiliki kemampuan dalam perencanaan/pengorganisasian.

Pada variabel ini, peneliti menggunakan kuesioner dari penelitian terdahulu dengan menggunakan kuesioner Darmawan (2018).

## **2.6. Sistem Pengendalian Internal**

### **2.6.1. Definisi Sistem Pengendalian Internal**

Menurut Arens, dkk (2013), menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang realibilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Mulyadi (2014), sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mematuhi kebijakan manajemen.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, definisi sistem pengendalian internal adalah:

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memberi kepastian yang layak dalam mencapai tujuan organisasi tentang realibilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.



### **2.6.2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal**

Menurut Hall (2007), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umumnya, yaitu;

1. Menjaga aktiva entitas
2. Memasuki akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi
3. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan
4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang diterapkan oleh manajemen.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tujuan sistem pengendalian internal ialah memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun menurut Mahmudi (2010), menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI). Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

### **2.6.3. Unsur Sistem Pengendalian Internal**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, terdapat lima unsur dalam pengendalian internal, yaitu;

1. Lingkungan pengendalian, yang terdiri dari:
  - a. Penegakan integritas dan etika
  - b. Komitmen terhadap kompetensi
  - c. Kepemimpinan yang kondusif
  - d. Struktur organisasi sesuai kebutuhan
  - e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab
  - f. Kebijakan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat
  - g. Peran aparat pengawasan intern atau APIP yang efektif
  - h. Hubungan kerja yang baik.
2. Penilaian risiko, yang terdiri dari:
  - a. Identifikasi risiko
  - b. Analisis rasio.
3. Kegiatan pengendalian, yang terdiri dari:
  - a. Review kinerja instansi
  - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)
  - c. Pengendalian pengelolaan sistem informasi
  - d. Pengendalian fisik aset
  - e. Penetapan dan review indikator dan ukuran kinerja
  - f. Pemisahan fungsi
  - g. Otoritas transaksi dan kejadian penting
  - h. Pencatatan akurat dan tepat waktu
  - i. Pembatasan akses sumber daya
  - j. Akuntabilitas sumber daya

- k. Dokumentasi sistem pengendalian intern.
- 4. Informasi dan komunikasi, yang terdiri dari:
  - a. Sarana komunikasi
  - b. Manajemen sistem informasi.
- 5. Pemantauan dan pengendalian intern:
  - a. Pemantauan berkelanjutan
  - b. Evaluasi terpisah
  - c. Tindak lanjut.

Pada variabel ini, peneliti menggunakan kuesioner dari penelitian terdahulu dengan menggunakan kuesioner Darmawan (2018).

### **2.7. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Konsep teori keagenan menurut Scott (2015) ialah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* merupakan pihak yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* merupakan pihak yang menjalankan kepentingan *principal*. Mardiasmo (2005) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik sebagai pemegang mandat (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak yang memberi mandat (*Principal*) yang memiliki hak untuk mendapat pertanggungjawaban.

## **2.8. Hubungan Antar Variabel**

### **2.8.1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dalam Mardiasmo (2002), standar akuntansi ialah sebagai pedoman dalam mengatur atau menentukan perilaku akuntansi dalam proses penyusunan laporan keuangan yang ditujukan untuk pengguna laporan keuangan tersebut. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, dengan jelas disebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapannya dalam lingkup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah.

Dengan diterapkannya prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintah sesuai yang ditetapkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010, maka laporan yang disajikan akan memudahkan pengguna memahami laporan keuangan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dimana tujuan dari pembuatan laporan keuangan daerah ialah untuk menyajikan informasi yang jelas serta untuk membuat keputusan dan evaluasi kinerja.

### **2.8.2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Halim (2007) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ialah sebagai berikut:

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak

eksternal pemerintah daerah. Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengawas Keuangan, investor, kreditur, rakyat, analis dan pemerhati pmda, dan pemerintah pusat.”

Penerapan SAKD sangat penting di seluruh pemerintahan, karena dengan menerapkan SAKD yang baik, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi suatu pemerintah daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Jika penerapan SAKD tidak dilakukan dan tidak sesuai peraturan pemerintah, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan dianggap tidak memadai bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Sehingga, sistem akuntansi merupakan prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi (Hariadi, dkk, 2010).

### **2.8.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Mangkunegara (2012) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Tingkat kompetensi yang dimiliki setiap pegawai merupakan salah satu bagian terpenting bagi pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Sebaliknya, jika pemerintah memiliki sumber daya manusia yang tidak kompeten, maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak akan berkualitas dan tidak dapat memenuhi ketentuan SAP. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pemerintah di masa depan. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif dan ekonomis. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia tersebut maka pembuatan laporan keuangan akan lebih efektif dan efisien. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan (Mardiasmo, 2005).

#### **2.8.4. Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Mulyadi (2014), sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mematuhi kebijakan manajemen. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI). Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah (Mahmudi, 2010).

Setiap pemerintah daerah harus memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang baik, karena akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah yang dihasilkan. Selain itu, dengan mengelola SPI dengan baik, pemerintah daerah dapat mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan, serta dapat menjaga efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

## 2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dengan variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen.

### 1. Darmawan (2018)

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” dengan total sampel sejumlah 80 pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah, dan umur berpengaruh positif signifikan, sedangkan jenis kelamin berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### 2. Pujanira (2017)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Penerapan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” dengan total sampel sejumlah 104 pegawai Bagian Keuangan Dinas Daerah Pemda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Malle (2013)

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar” dengan total sampel sejumlah 42 pegawai bagian akuntansi/tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan, sedangkan sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Chabibah (2019)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu” dengan total sampel sejumlah 70 pegawai Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive*



*sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, dan audit internal berpengaruh positif signifikan, sedangkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### 5. Rangkuti (2017)

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Implementasi Simda Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal” dengan total sampel sejumlah 60 pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan, sedangkan kualitas data, dukungan manajemen, dan faktor eksternal berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Tabel 2.1.**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Subjek</b>	<b>Hasil</b>
Darmawan (2018)	Variabel Independen: X1: Kompetensi Sumber Daya Manusia X2: Sistem Pengendalian Intern X3: Standar Akuntansi Pemerintah X4: Umur X5: Jenis Kelamin	Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap LKPD 2. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap LKPD 3. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif

	<p>Variabel Dependen:</p> <p>Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)</p>		<p>signifikan terhadap LKPD</p> <p>4. Umur berpengaruh positif signifikan terhadap LKPD</p> <p>5. Jenis Kelamin berpengaruh negatif signifikan terhadap LKPD</p>
Pujanira (2017)	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1: Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>X2: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah</p> <p>X3: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Pegawai Bagian Keuangan Dinas Daerah Pemda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	<p>1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap LKPD</p> <p>2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap LKPD</p> <p>3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap LKPD.</p>
Malle (2013)	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1: Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>X2: Sistem Pengendalian Internal</p> <p>X3: Pengawasan Keuangan Daerah</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)</p>	<p>Pegawai bagian akuntansi/tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan.</p>	<p>1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap LKPD</p> <p>2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap LKPD</p> <p>3. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap LKPD.</p>
Chabibah (2019)	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>X2: Audit Internal</p>	<p>Pegawai Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota</p>	<p>1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap LKPD</p>

	<p>X3: Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>Variabel Dependen: Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)</p>	Batu, Jawa Timur.	<p>2. Audit Internal berpengaruh positif signifikan terhadap LKPD</p> <p>3. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap LKPD.</p>
Rangkuti (2017)	<p>Variabel Independen: X1: Kompetensi Sumber Daya Manusia X2: Sistem Pengendalian Internal X3: Kualitas Data X4: Dukungan Manajemen X5: Faktor Eksternal</p> <p>Variabel Dependen: Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)</p>	Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.	<p>1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap LKPD</p> <p>2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap LKPD</p> <p>3. Kualitas Data berpengaruh negatif signifikan terhadap LKPD</p> <p>4. Dukungan Manajemen berpengaruh negatif signifikan terhadap LKPD</p> <p>5. Faktor Eksternal berpengaruh negatif signifikan terhadap LKPD.</p>

## 2.10. Pengembangan Hipotesis

### 2.10.1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Mardiasmo (2002), standar akuntansi ialah sebagai pedoman dalam mengatur atau menentukan perilaku akuntansi dalam proses penyusunan laporan keuangan yang ditujukan untuk pengguna laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, dengan jelas disebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapannya dalam lingkup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah. Dengan kata lain, semakin sesuai penerapan standar akuntansi pemerintah pada laporan keuangan pemerintah daerah, maka semakin tinggi kualitas yang dihasilkan dari suatu laporan keuangan.

Hasil dari penelitian dari Darmawan (2018) menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD. Hal ini didukung oleh penelitian Pujanira (2017) yang juga menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Maka dari penelitian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H1: Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

#### **2.10.2. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Mahsun, dkk (2013), menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan proses untuk memahami metode dan tata cara penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah yang ditetapkan disuatu pemerintahan daerah. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan pelaksanaan dari pasal 232 ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006 mulai dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan yang dijadikan

sebagai pedoman penyajian informasi laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan.

Menurut Hariadi, dkk (2010), sistem akuntansi merupakan prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. Penerapan SAKD harus dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah daerah dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan SAKD dapat tercapai. Tujuannya ialah kemampuan pemerintah dalam melaporkan dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Hasil penelitian dari Pujanira (2017) menunjukkan bahwa penerapan SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Hasil ini didukung oleh penelitian dari Chabibah (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H2: Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.**

### **2.10.3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Mangkunegara (2012) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Menurut Mardiasmo (2005), sumber daya

manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif dan ekonomis.

Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia tersebut maka pembuatan laporan keuangan menjadi efektif dan efisien. Karena sumber daya manusia memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan. Dengan kata lain, semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka laporan keuangan yang dihasilkan suatu pemerintah daerah akan semakin berkualitas.

Hasil penelitian dari Darmawan (2018) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Hasil penelitian Pujanira (2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Hasil penelitian Malle (2013) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Terakhir, hasil penelitian dari Rangkuti (2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

Hasil dari keempat penelitian diatas mendukung teori yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H3: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.**

#### **2.10.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Arens, dkk (2013), menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang realibilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mematuhi kebijakan manajemen (Mulyadi, 2014).

Jika sistem pengendalian internal dapat dikelola dengan baik, maka pemerintah daerah dapat mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan, serta dapat menjaga efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan begitu, semakin baik pengelolaan sistem pengendalian internal, maka akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang semakin berkualitas.

Hasil penelitian dari Darmawan (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Hasil penelitian dari Rangkuti (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Sedangkan hasil penelitian dari Malle (2013) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas LKPD. Dari ketiga hasil penelitian yang

ditunjukkan, peneliti lebih mendukung penelitian Darmawan (2018) dan Rangkuti (2017).

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, laporan keuangan daerah yang dihasilkan akan sejalan dengan tingkat keberhasilan dalam mengelola sistem pengendalian internal. Begitu pun sebaliknya, semakin baik pengelolaan sistem pengendalian internal, maka semakin sedikit adanya kesalahan dan kecurangan dalam laporan keuangan daerah yang dihasilkan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H4: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.**